BAB II
TINJAUAN TEORI

2.1 Pengertian dan Klasifikasi Kegiatan Perdagangan

Uraian berikut ini akan menjelaskan pengertian dan klasifikasi kegiatan perdagangan. Uraian ini sifatnya merupakan pengantar sebelum memasuki pengertian pasar tradisional.

2.1.1 Pengertian Kegiatan Perdagangan

Kegiatan penduduk dalam perekonomian suatu kota secara umum dijalin oleh tiga faktor yang mempunyai arti penting di dalam kehidupan suatu kota, yaitu kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Ketiga kegiatan utama tersebut merupakan mata rantai yang saling berkaitan satu sama lain (Ratcliff dalam Karyani, 1992:61).

Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Pihak yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan permintaan dari pihak yang memakai/menghabiskan barang/jasa. Pihak ini biasa disebut konsumen. Sedangkan kegiatan distribusi ialah kegiatan yang menghubungkan atau mempertemukan kegiatan produksi dengan kegiatan konsumen. Kegiatan inilah yang kemudian lebih dikenal sebagai kegiatan pedagang.

2.1.2 Klasifikasi Kegiatan Perdagangan

Kegiatan perdagangan dapat diklasifikasikan berdasarkan volume barang yang dijual, bentuk tempat, jenis komoditas yang dijual, cara transaksi barang, dan lain-lain. Berikut ini dijelaskan uraian mengenai klasifikasi di atas.

a. Berdasarkan volume barang yang dijual

Berdasarkan volume barang yang dijual, kegiatan perdagangan dibagi atas perdagangan grosir dan perdagangan eceran. Perdagangan gosir atau *wholesaler*

adalah pedagang yang memperjualbelikan komoditas dalam partai atau skala yang besar dan konsumennya merupakan konsumen pertama yang akan mendistribusikan lagi kepada konsumen berikutnya. Sedangkan pedagang eceran atau *retail* adalah perdagangan yang memperjualbelikan komoditas dalam partai kecil dan konsumennya merupakan konsumen akhir yang langsung memakai komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Menurut Kotler, perdagangan eceran adalah semua perdagangan yang berkenaan dengan penjualan barang-barang dan jasa-jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan penggunaan bisnis (Kotler, 1986:116). Perdagangan eceran juga sering diutarakan sebagai *the sale of goods in small quantities.* Hal ini sesuai dengan jumlah yang diperlukan untuk konsumen akhir seperti kebutuhan rumah tangga untuk langsung dikonsumsi (J.A. Sinungan dalam Prisma, 1987). Meskipun definisi perdagangan eceran menccakupi barang dan jasa, namun pada umumnya ia lebih mengutamakan barang yang kongkrit (*tangible goods*). Di dalamnya tidak tercakup jasa-jasa seperti listrik, jasa komunikasi ataupun hiburan.

b. Berdasarkan cara distribusi barang

Berdasarkan cara distribusi barang kegiatan perdagangan dibagi atas dua cara. Cara pertama adalah penjual mendatangi lokasi konsumen, sedangkan cara kedua adalah konsumen mendatangi lokasi penjual. Khusus untuk cara kedua, para pedagang akan menempati lokasi-lokasi dalam ruang yang menguntungkan dan strategisdijelaskan pada uraian prinsip penentuan lokasi.

Proses terjadinya interaksi antara produsen dengan konsumen disebut pasar (pendapat Smith yang dikutip oleh Karyani, 1992:28). Pasar dalam konteks Smith ini secara umum tanpa memperhatikan unsur ruang. Bila pasar ditinjau dari segi ruang maka pasar hanyalah merupakan salah satu tempat kegiatan perdagangan

c. Berdasarkan bentuk tempat perdagangan

Bentuk tempat perdagangan eceran di Indonesia, dapat dibeda-bedakan sebagai berikut: pasar tradisional, warung toko, pusat perbelanjaan, pusat pertokoan, *departement store*, *supermarket*, *super bazaar*, *spesciality store*,

boutique, dan pasar khusus (J.A. Sunungan dalam Prisma , 1987). Sedangkan menurut Direktorat Bina Sarana Pasar Dalam Negeri, pasar dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pasar Moder (meliputi: *departement store* dan pasar swalayan) serta pasar tradisional (meliputi: pasar tradisional dan pasar desa).

d. Berdasarkan jenis komoditas yang dijual

Berdasarkan jenis komoditi yang dijual menurut kegiatan perdagangan dapat digolongkan menjadi tiga (pendapat Gallion yang dikutip dari Ermiwati, 1989:29), yaitu:

1. Kegiatan perdagangan komoditas primer

   Merupakan jenis perdagangan komoditas yang dibutuhkan sehari-hari, seperti beras, sayur-sayuran, bumbu masak, daging, telur, buah-buahan dan sebagainya. Frekuensi pembelian harian tinggi dan volume pembelian omoditas ini biasanya dalam limit yang relatif kecil.

2. Kegiatan perdagangan komoditas sekunder

   Merupakan komoditas yang mempunyai sifat pelayanan kebutuhan tidak teratur, dalam arti frekuensi pembelian tidak tetap, dimana rasa kebutuhan timbul dalam selang waktu tertentu.komoditas ini dapat dikatakan agak jarang dibeli, akan tetapi pembeli akan sanggup mendapatkannya ke lokasi kegiatan walaupun jaraknya relatif jauh. Kelompok komoditi sekunder terdiri atas komoditas sandang dan kelontongan mahal seperti pakaian, sepatu, tekstil, alat-alat rumah tangga, pecah belah, buku dan alat-alat tulis, dan sebagainya.

3. Kegiatan perdagangan komoditas tersier

   Kegiatan perdagangan komoditas tersier memiliki karakteristik pelayanan kebutuhan penduduk yang jarang sekali dibeli dan biasanya dibeli oleh penduduknya yang benar-benar perlu dan cukup mampu, seperti perhiasan, televisi, dan komoditi mewah/*lux* lainnya.

2.1.3 Pengertian Pasar Tradisional

Menurut pengertiannya, pasar merupakan suatu tempat bagi manusia dalam mencari keperluan sehari-harinya (Trisnawati, 1988). Sedangkan menurut Belshaw (dalam Suprapto, 1988) Pasar adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur social, ekonomis, kebudayaan, politis dan lain-lain, tempat pembeli dan penjual (atau penukar tipe lain) saling bertemu untuk mengadakan tukar-menukar.

Jika dilihat dari mutu pelayanannya, kegiatan perdagangan dapat dibedakan tempat perbelanjaan tradisional terdiri dari pasar tradisional, toko-toko, warung, dan lain-lainnya. Pada studi ini yang dibahas adalah pasar tradisional saja. Pasar Tradisional dapat diklasifikasikan berdasarkan :

a. Jenis Pasar

Pembagian jenis pasar adalah berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan sehingga dengan pertimbangan itu ditentukan jenis pasar umum, pasar mambo dan pasar khusus.

1. **Pasar umum** adalah pasar yang menjual barang-barang kebutuhan penduduk baik primer, sekunder, tersier serta barang-barang khusus, dan jasa-jasa lainnya. Biasanya ruang lingkup pelayanannya selain untuk konsumen kota juga dapat melayani penduduk di sekitar kota bersangkutan (regional).
2. **Pasar mambo** adalah pasar sore atau pasar malam yang biasanya menjual makanan dan minuman.
3. **Pasar khusus** ditentukan dari spesialisasi jenis barang yang diperdagangkan seperti pasar khusus yang menjual bunga, onderdil dan lain-lain.

b. Status Pasar

Status pasar ini memberikan pengertian adanya pasar resmi dan pasar tidak resmi/liar. Pasar resmi adalah pasar dan tempat berjualan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang terdapat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Dikarenakan lokasinya ditetapkan oleh pemerintah daerah maka lokasi bangunan pasar telah memenuhi persyaratan perencanaan kota maupun teknis bangunan.

Namun untuk pasar tidak resmi/liar adalah yang mempunyai pengertian fungsi yang sama hanya statusnya yang berbeda atau ilegal.

c. Tingkatan Pasar

Pengertian tingkatan pasar dapat dibedakan atas pasar induk dan pasar bawahan. Pengertian pasar induk adalah suatu tempat sebagai pemusatan pedagang-pedagang besar atau grosir yang mempunyai peranan aktif dalam pemasaran barang-barang yang sesuai dengan jenis komoditi, dengan jalan mengatur suplai, pembentukan harga sesuai dengan permmintaan. Satu pasar induk akan membawahi/terdiri atas beberapa pasar bawahan.

d. Kelas Pasar

Pasar-pasar tradisional di Kotamadya Bandung melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kotamadya Bandung No.18 tahun 1996 Tentang Retribusi Pasar, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelas pasar, yaitu:

- Kelas I adalah pasar-pasar yang berada di jalan protokol, dibangun secara permanen;
- Kelas II adalah pasar-pasar yang berada pada lokasi bukan jalan protokol dan dibangun semi permanen;
- Kelas III adalah pasar-pasar yang berada pada lokasi di luar yang disebut pada kelas I dan II.

Dalam Perda yang sama, letak ruang dagang pada sebuah pasar juga diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- Paling Baik (PB) adalah toko, kios yang menghadap keluar pasar, pinggir jalan yang dilewati pada jalan utama masuk dan keluar pasar;
- Baik (B) adalah toko, kios antara yang dilewati pada jalan utama masuk dan keluar pasar;
- Cukup (C) adalah toko, kios yang dilewati jalan samping untuk masuk dan keluar pasar;
- Sedang (S) adalah kios, meja dan gelaran yang tidak termasuk pada kategori PB,B, dan C.

Dalam studi ini pasar tradisional yang dibahas adalah pasar umum yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tegasnya, pasar tradisional yang dimaksudkan dalam studi ini berarti pasar tradisional yang menjual barang kebutuhan sehari-hari, dan secara resmi diakui oleh pemerintah.

2.2 Pengaruh Kegiatan Perdagangan Terhadap Penyarapan Tenaga Kerja

2.2.1 Pengertian Tenaga Kerja

- Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja untuk mengerjakan sesuatu; pekerja; pegawai. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- Tenaga Kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara produksi barang dan jasa jika tenaga mereka diminta.
- Ilmu tenaga kerja merupakan suatu sistem hubungan yang terorganisir, akan tetapi juga merupakan suatu subsistem pada sistem ekonomi yang lebih luas. Ilmu ekonomi tenaga kerja memusatkan perhatiannya pada tingkah laku perorangan dalam peranan mereka sebagai pihak peminta yang membutuhkan jasa tenaga kerja.
- Lapangan kerja menurut statusnya terbagi menjadi dua, (ILO, 1972) yaitu :
    a. Sektor formal memiliki karakteristik :
        1. Hampir seluruh aktivitasnya bersandar dari sumber daya luar.
        2. Ukuran usahanya berskala besar dan memiliki badan hukum.
        3. Untuk menjalankan roda usahanya ditopang oleh teknologi padat modal dan biasanya hasil impor.
        4. Tenaga kerja yang bekerja di sektor ini mendapatkan latihan dan pendidikan di lembaga formal.
        5. Kerapkali aktivitasnya berjalan dan berlaku dalam pasar yang terlindungi.
    b. Sektor informal memiliki karakteristik :
        1. Seluruh aktivitasnya bersandar pada sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitarnya.

2. Ukuran usaha umumnya kecil dan aktivitasnya merupakan usaha rumah tangga.
3. Untuk menopang aktivitasnya itu digunakan teknologi yang sederhana dan tepat guna serta memiliki sifat padat karya.
4. Tenaga kerja pada sektor ini adalah tenaga kerja terdidik dan terlatih dalam pola yang tidak resmi.
5. Seluruh aktivitasnya dalam sektor ini berada di luar jalur yang diatur pemerintah.
6. Pasar yang mereka masuki mempunyai tingkat persaingan yang sangat tinggi.

2.2.2 Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia

Pembangunan nasional, yang telah dilaksanakan pemerintah selama ini, secara konsisten telah merumuskan seluruh kebijakan untuk meningkatkan kualitas penduduk (sumber daya manusia), terutama di bidang ketenagakerjaan. Kebijakan inipun juga masih dilanjutkan dan menjadi penekanan utama pada PJP II. Sebab seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesiapun mengalami peningkatan dalam jumlah absolutnya.

Peta ketenagakerjaan di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia pada umumnya diwarnai 3 (tiga) ciri utama. *Pertama*, laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi sebagai akibat derasnya arus pertumbuhan penduduk yang memasuki kerja. *Kedua*, jumlah angkatan kerja yang besar tapi rata-rata berpendidikan rendah. *Ketiga*, partisipasi angkatan kerja tinggi tapi rata-rata pendapatan pekerjanya rendah (lihat Wirakartakusumah, 1992).

Pasar kerja di Indonesia mengalami *dualisme*. Di satu pihak terdapat kelebihan penawaran (*labour surplus*), di pihak lain terdapat kelebihan permintaan (*excess demand*). Kelebihan yang rendah, dan mayoritas dengan pendidikan dan kemampuan produksinya rendah. Mereka pada ummnya *under utilized*, meskipun demikian tidak dapat keluar dari pasar kerja yang berciri kelebihan pekerja tersebut dan juga tidak dapat masuk ke pasar kerja yang kelebihan permintaan. Sebaliknya

kelebihan permintaan biasanya ditujukan pada mereka yang berpendidikan dan kemampuan produksinya tinggi. Mereka hampir tidak ada yang *under utilized* tapi bahkan cenderung *over utilized*.

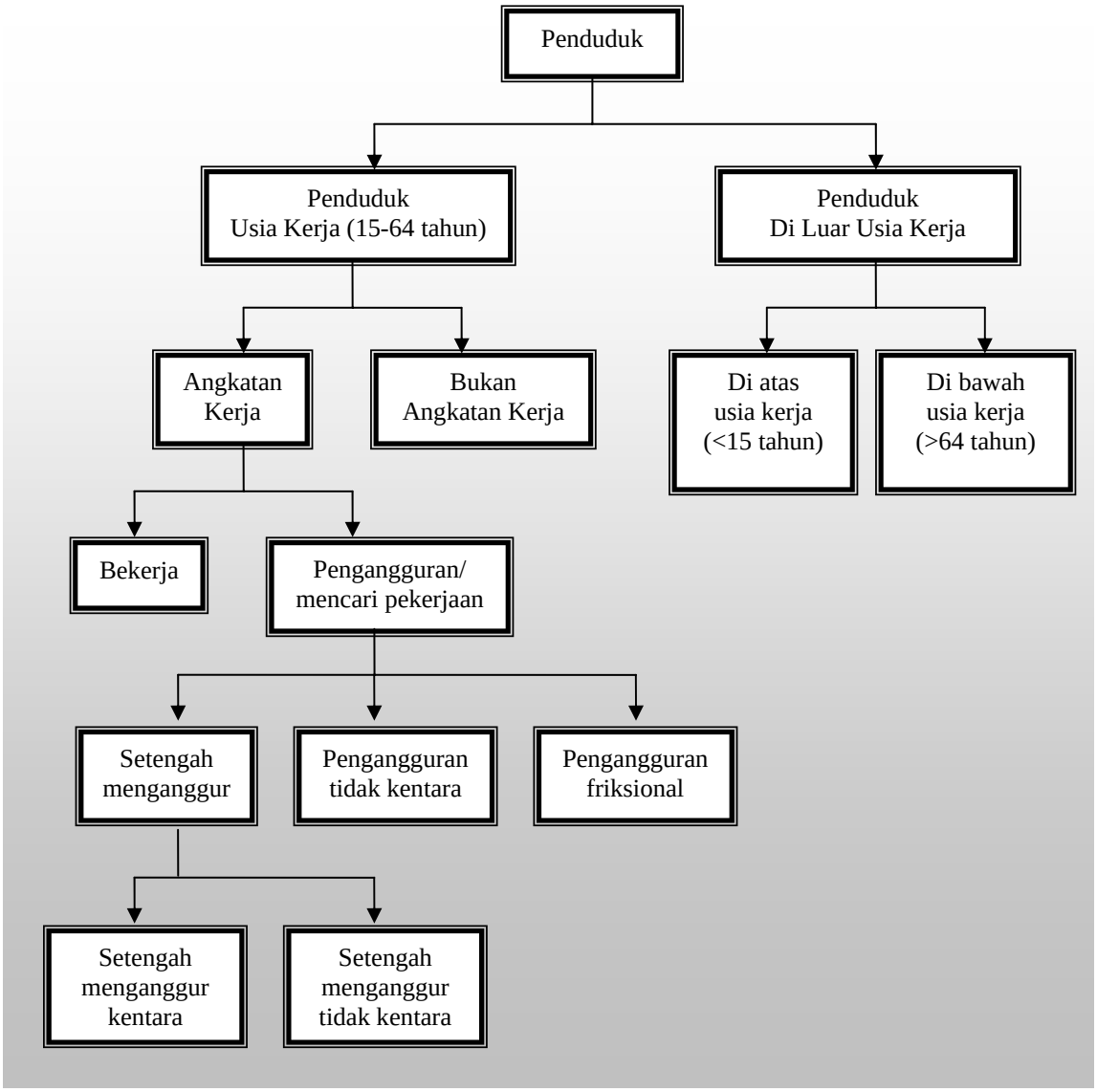
Pembangunan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009) telah dirumuskan dalam prinsip *triple track strategy* yaitu *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi), *pro-job* (kesempatan lapangan kerja) dan *pro – poor* (rakyat miskin). *Track* pertama dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan yang mengutamakan ekspor dan investasi, *track* kedua dengan menggerakkan sektor *riil* untuk menciptakan lapangan kerja, dan *track* ketiga dengan merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan.

Dalam strategi tersebut jelas dinyatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas penting dalam Pembangunan Indonesia karena tenaga kerja merupakan modal penting dalam menggerakkan roda pembangunan suatu negara.

Adapun rincian mengenai bahasan mencakup kondisi Angkatan Kerja dan Bukan angkatan Kerja. Pendekatan teori ketenagakerjaaan yang digunakan BPS dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti ditunjukkan pada gambar 2.1. Penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan sisanya adalah Bukan Angkatan Kerja.

Dalam konsep yang digunakan BPS, bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus selama semingguyang lalu (mengacu pada tanggal pencacahan), termasuk pekerja keluarga/tak dibayar yang ikut membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha seperti sewa, bunga, dan keuntungan, baikberupa uang maupun barang bagi pengusaha. Kegiatan

bekerja ini mencakup baik yang sedang bekerja, maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerj, misal karena cuti, sakit, dan lainnya. Penduduk yang bekerja sesuai konsep BPS ini termasuk dalam kelompok Angkatan Kerja. Pada gambar 2.1 berikut ini akan memberikan gambaran tentang penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.



Gambar 2.1
Diagram Penduduk menurut Usia Kerja

- Kelompok Angkatan Kerja :
  a. Seseorang yang selama seminggu sebelum pencacahan dia sudah memperoleh pekerjaan.
  b. Seseorang yang selama seminggu sebelum pencacahan dia termasuk tidak melakukan pekerjaan, syarat :
     - pegawai yang cuti
     - sakit ◊ tidak bekerja
- Kelompok Bukan Angkatan Kerja :
  - Usia sekolah
  - Ibu rumah tangga
  - Penerima pendapatan : pensiunan, saham, bunga deposito, dll
  - Seseorang yang hidupnya bergantung pada orang lain.
- Kelompok Setengah Menganggur :
  a. Kentara : seseorang yang bekerja/paruh waktu, dia bekerja lebih pendek dari waktu bekerja.
  b. Tidak Kentara : bekerja *fulltime* (jam 08.00-17.00) tapi dia bekerja *fulltime* dia tidak punya kebebasan untuk mengembangkan keahliannya.
- Kelompok Pengangguran Tidak Kentara : seseorang yang dilihat dari produktifitasnya.
- Pengangguran Friksional : seseorang yang dia bekerja pindah dari pekerja satu ke pekerja lain (untuk menunggu perpindahan waktu itu).
- Jika perkembangan ekonomi di suatu negara baik, maka kesempatan kerja yang tersedia akan semakin banyak.

2.2.3 Ketenagakerjaan Penduduk

2.2.3.1 Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur

Dalam analisis ketenagakerjaan, penduduk yang bekerja dapat dibedakan menurut kelompok umur. Tujuannya adalah untuk melihat kontribusi pekerja muda, pekerja prima dan pekerja tua dalam dunia pasar tenaga kerja. Idealnya, mayoritas penduduk yang bekerja dalam pasar tenaga kerja berusia prima. Namun tidak

menutup kemungkinan penduduk dalam usia muda dan tua dapat ikut andil dalam pasar tenaga kerja tersebut. Hal ini antara lain disebabkan adanya rasa tanggung jawab untuk mencari nafkah, membantu rumah tangga/keluarga/adanya kebutuhan akan sosialisasi dan pengakuan dari masyarakat.

Pekerja Usia Muda ini termasuk juga mereka yang sedang bersekolah atau berusia antara 15-19 tahun, sedangkan persentase penduduk usia tua adalah usia 55 tahun keatas termasuk mereka yang yang memasuki masa pensiun namun tetap masih berkarya.

2.2.3.2 Penduduk Bekerja menurut Tingkat Pendidikan

Selain dapat dibedakan menurut kelompok umur, dalam analisis ketenagakerjaan penduduk yang bekerja juga dapat dibedakan menurut tingkat pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu atau sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi tidak tepat. Sebaliknya, karena tingginya permintaan tenaga kerja pada jenis pekerjaan yang hanya mengandalkan fisik atau berpendidikan rendah, maka kereka yang berpendidikan rendah justru dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

2.2.3.3 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha yang digunakan BPS mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indoneia (KBLI). Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomi apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha termasuk dalam KILM ke-4, yaitu *Employment by sector*.

Lapangan usaha dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori tergantung analisis yang diinginkan. Salah satu pengelompokkan lapangan usaha adalah mengikuti KBLI tahun 2005 yang biasa disebut dengan kategori lapangan usaha, yaitu :

A. Pertanian, perburuan, kehutanan
B. Perikanan
C. Pertambangan dan penggalian
D. Industri Pengolahan
E. Listrik, gas dan air
F. Konstruksi
G. Perdagangan besar dan eceran
H. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
I. Trasnportasi, pergudangan, dan komunikasi
J. Perantara keuangan
K. Real estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan
L. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
M. Jasa pendidikan
N. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
O. Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya.
P. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga.

Untuk analisis ketenagakerjaan, biasanya 16 kategori tersebut dikelompokkan menjadi 9 jenis lapangan usaha. Terjadi beberapa pengangguran kategori yaitu Kategori A dan B menjadi Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan. Kategori G dan H menjadi Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel. Kategori J dan K menjadi Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan. Kategori L, M, N, O, dan P menjadi Jasa Kemasyarakatan. Sedangkan lima kategori lainnya tetap.

2.2.3.4 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan

Status Pekerjaan adalah kedudukan seorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Indikator ini merupakan KILM ke-3 yaitu *Status in Employment*. Salah satu kegunaan indikator ini adalah untuk mengetahui pekerja di sektor informal.

2.2.3.5 Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja

Jumlah jam kerja memberi dampak bagi kesehatan dan kesejahteraan pekerja dan juga terhadap tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja (*labour cost*). Mengukur tingkat dan perkembangan jumlah jam kerja secara berkelompok maupun individual merupakan hal penting untuk memantau kondisi pekerjaan/kehidupan pekerja dan untuk menganalisis perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah. Dua ukuran yang dapat dihasilkan dari indikator ini ialah jumlah penduduk bekerja menurut kelompok jam kerja per minggu dan rata-rata jumlah jam kerja per tahun untuk setiap penduduk yang bekerja.

Proporsi yang bekerja menurut jumlah jam kerja yang merupakan KLIM ke-6 (*Hours of Work*) dan proporsi setengah pengangguran karena lama waktu bekerja kurang dari jumlah kerja normal (*time-related underempleyment*) yang merupakan KILM ke-12 merupakan indikator-indikator yang juga dihasilkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Indikator setengah pengangguran ini sebelumnya dikenal sebagai pengangguran pengangguran kentara (*visible underempleyment*).

Kedua indikator ini berguna untuk mengetahui proporsi penduduk bekerja yang dapat dikategorikan sebagai pekerja ”murni” dan proporsi penduduk bekerja namun dikategorikan pengangguran karena jumlah jam kerjanya kurang dari jumlah jam kerja normal. Di Indonesia seseorang dikatakan murni bekerja apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu dengan konsep jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja tidak tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan. Jumlah jam kerja tersebut merupakan kumulatif selama satu minggu.

2.2.4 Penciptaan Lapangan Kerja

Masyarakat sangatlah mendambakan tersedianya banyak lapangan pekerjaan karena keadaan seperti ini berarti dapat dihasilkannya output yang tinggi dan diperolehnya pendapatan yang tinggi pula. Disamping itu, banyak kelompok masyarakat yang menganggap bekerja itu mempunyai nilai tersendiri. Jika angka pengangguran tinggi maka banyak output yang hilang, pendapatan menurun, dan masyarakat menderita batin karena hilangnya rasa harga diri (Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus).

Lapangan kerja merupakan sumber pendapatan bagi angkatan kerja. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dari lapangan kerja menentukan kemakmuran suatu keluarga. Semakin tinggi tingkat produktivitas lapangan kerja maka akan semakin besar pilihan yang tersedia bagi sumber daya manusia (SDM).

Kegiatan perdagangan di pasar baru membutuhkan tenaga kerja dan kegiatan pendukung agar kegiatan perdagangan dapat berjalan sesuai tujuannya. Dalam suatu wilayah terdapat agen ekonomi yaitu rumah tangga dan (perusahaan) pelaku usaha sebagai tempat produksi barang dan jasa. Rumah tangga menjual tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kegiatan produksi dan membeli barang ataupun jasa yang disediakan oleh kegiatan produksi tersebut.

Kegiatan perdagangan di pasar baru Kota Bandung akan menciptakan lapangan kerja yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk kota. Intensifikasi dan deversifikasi lapangan kerja memungkinkan untuk dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga dapat mengurangi pengangguran penduduk Kota Bandung.

Dalam Temple Marion, 1994 menyebutkan bahwa bentuk *multiplie*r dalam suatu wilayah akibat berkembangnya suatu kegiatan yang dianggap mendorong terhadap perkembangan wilayah, yaitu:

- *The output multiplier*, yaitu *multiplier* yang dihasilkan oleh kegiatan yang mendorong terhadap peningkatan output atau produksi wilayah tersebut.
- *The employment multiplier*, yaitu multiplier yang dihasilkan oleh kegiatan yang mendorong terhadap peningkatan tenaga kerja baik yang mendukung

secara langsung maupun yang menunjang untuk kegiatan produksi barang atau jasa.

- *The household-income multiplier* yang dihasilkan akibat meningkatnya produksi barang dan jasa sehingga meningkatkan pendapatan keluarga (individu) sebagai penyedia tenaga kerja dan dari pendapatan yang diperoleh tersebut akan dibelanjakan untuk mengkonsumsi barang dan jasa.

Suatu kajian oleh Edward F. Denison mengungkapkan bahwa diantara tahun 1929 sampai 1957, 54% dari perkembangan ekonomi salah satu Negara barat adalah kontribusi tenaga kerja, sedangkan kontribusi modal dan peralatan hanya 18%. Kajian tersebut juga mengungkapkan bahwa pelatihan, suasana kerja dan lain-lain factor yang menyangkut pembinaan tenaga kerja sangat mempengaruhi naik turunnya produktivitas. Ditinjau dari pendapatan rata-rata perkapita, tenaga kerja yang memperoleh pembinaan yang sesuai dengan arah perkembangan seluruh ekonomi Negara menyumbangkan 42% kepada kenaikan total pendapatan Negara.

2.2.5 Upah Minimum Regional (UMR)

UMR adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, sehingga diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan.

Saat ini UMR juga dienal dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota

(UMK). Upah Minimum Provinsi di Indonesia tahun 2008, ddapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1
Upah Minimum Provinsi di Indonesia

Provinsi	Jumlah
1. Nanggroe Aceh Darussalam	Rp 1.000.000,00
2. Sumatera Utara	Rp 822.205,00
3. Sumatera Barat	Rp 700.000,00
4. Riau	Rp 800.000,00
5. Kepulauan Riau	Rp 833.000,00
6. Jambi	Rp 724.000,00
7. Sumatera Selatan	Rp 743.000,00
8. Bangka Belitung	Rp 813.000,00
9. Bengkulu	Rp 683.528,00
10. Lampung	Rp 678.900,00
11. Jawa Barat :	
• Kabupaten Bogor	Rp 873.231,00
• Kota Depok	Rp 962.500,00
• Purwakarta	Rp 763.000,00
• Kota Bekasi	Rp 994.000,00
- Upah Minimum Kelompok I	Rp 1.020.000,00
- Upah Minimum Kelompok II	Rp 1.013.000,00
• Kabupaten Bekasi	Rp 980.589,60
- Upah Minimum Kelompok I	Rp 1.020.000,00
- Upah Minimum Kelompok II	Rp 1.019.000,00
• Kab. Sumedang (Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung & Pamulihan)	Rp 886.000,00
• Kab. Sumedang (diluar Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung & Pamulihan)	Rp 700.000,00
• Kabupaten Karawang	Rp 912.225,00
- Upah Minimum Kelompok I	Rp 924.619,00
- Upah Minimum Kelompok II	Rp 970.000,00
- Upah Minimum Kelompok III	Rp 1.013.583,00
• Kota Bandung	Rp 939.000,00
• Kabupaten Bandung	Rp 895.980,00
12. DKI Jakarta	Rp 972.604,80
13. Banten	Rp 537.000,00
• Kabupaten Tangerang	Rp 953.850,00
• Kota Cilegon	Rp 978.400,00
14. Jawa Tengah	Rp 547.000,00
15. Yogyakarta	Rp 586.000,00
16. Jawa Timur	
• Kota Surabaya	Rp 805.500,00
• Kabupaten Sidoarjo	Rp 802.000,00
17. Bali	Rp 605.000,00

Provinsi	Jumlah
• Kabupaten Badung	
• Kota Denpasar	Rp 800.000,00
• Kabupaten Gianyar	Rp 760.000,00
• Kabupaten Jembrana	Rp 737.500,00
• Kabupaten Karangasem	Rp 712.320,00
• Kabupaten Klungkung	Rp 686.000,00
• Kabupaten Bangli	Rp 685.000,00
• Kabupaten Tabanan	Rp 685.000,00
• Kabupaten Buleleng	Rp 685.000,00
18. NTB	Rp 730.000,00
19. NTT	Rp 650.000,00
20. Kalimantan Barat	Rp 645.000,00
21. Kalimantan Selatan	Rp 825.000,00
22. Kalimantan Tengah	Rp 765.868,00
23. Kalimantan Timur	Rp 815.000,00
24. Maluku	Rp 700.000,00
25. Maluku Utara	Rp 700.000,00
26. Gorontalo	Rp 600.000,00
27. Sulawesi Utara	-
28. Sulawesi Tenggara	Rp 700.000,00
29. Sulawesi Tengah	Rp 670.000,00
30. Sulawesi Selatan	Rp 740.520,00
31. Sulawesi Barat	Rp 760.500,00
32. Papua	Rp 1.105.500,00

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Upah_Minimum_Regional